



A-N-T-I

**ALIANSA NASIONÁL TIMOR-LESTE BA TRIBUNÁL INTERNASIONÁL
(Aliansi Nasional Timor-Leste Untuk Pengadilan Internasional)**

Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili, Timor-Leste

Tel: +670-3321040 ka +670-77432621

E-mail: atino@laohamutuk.org ka lanarra.del@gmail.com Website: www.laohamutuk.org

Press Release

**SELAMAT DATANG PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KE TIMOR-LESTE
JANGAN MELUPAKAN KASUS KEJAHATAN MELAWAN KEMANUSIAAN**

“Memutuskan Impunitas dan Mempererat Konsolidasi Demokrasi dan HAM”

Sekalipun tangisan dan kesedihan akan bekas luka di tubuh kami, namun bahagia karena mendapat kunjungan Presiden Indonesia yang memiliki komitmen untuk mencari solusi soal kejahatan berat dari okupasi militer Indonesia mulai dari tahun 1975 hingga 1999. Kami berharap selama kunjungan ini sebagai tahap awal pada penyelesaian kejahatan melawan kemanusiaan yang mana belum ada proses akuntabilitas final.

Tindakan kejahatan dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan oleh militer Indonesia terhadap rakyat Timor-Leste belumlah lenyap dari alam pikiran rakyat Timor-Leste. Para pemimpin utama yang terlibat dalam kasus kejahatan berat masih bebas dan kejahatan yang mirip terus terjadi di Papua, Maluku dan beberapa tempat lain di Indonesia.

Dari banyak laporan termasuk laporan Chega! Mengeluarkan informasi tentang beragam kekerasan yang telah dilakukan oleh militer Indonesia terhadap masyarakat sipil Timor-Leste. Kekerasan itu termasuk penyiksaan, pembunuhan, penghilangan paksa, penghilangan hak-hak sipil politik, ekonomi dan social.

Selama 24 tahun, terjadi begitu banyak bentuk kejahatan. Seperti halnya, baru sesudah basis pendukung Falintil (*Forças Armada Libertação Nacional de Timor-Leste/ Pasukan Pembebasan Nasional Timor-Leste*) hancur, militer Indonesia dan kolaborator dari segelintir masyarakat Timor-Leste yang bekerja sama dengan Indonesia mulai mengisolasi rakyat jelata kedalam sejumlah kamp konsentrasi. Semua orang yang terlibat mengetahui situasi yang begitu sulit pada saat itu. Selama di kamp konsentrasi, penduduk sipil (orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran) tidak ada ruang kebebasan untuk berkebun atau berladang untuk

memproduksi bahan pangan untuk keluarga mereka. Para penduduk menderita kekurangan gizi dan kelaparan yang sangat dasyat, hingga banyak yang meninggal di periode kamp konsentrasi tersebut. Para penduduk kehilangan hak atas pangan, pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada kemiskinan struktural hingga saat ini.

Kendatipun proses atas kasus kejahatan berat sebagian telah dilakukan di Dili dan Jakarta untuk kasus 1999, belum muncul keadilan dan mendapat satu solusi kepada korban. Para pelaku utama yang memimpin beragam kejahatan hanya dua orang dari mereka yang sempat dipenjarakan sementara terdakwa lainnya masih bebas dari pengadilan yang berkredibilitas, seperti Prabowo Subianto, Wiranto, sementara para jenderal lainnya yang terlibat dalam kejahatan masih bebas dari proses peradilan.

Kami tahu bahwa proses demokrasi mulai berkembang lagi di Indonesia dimana rakyat dan para wartawan dengan leluasa mulai mengangkat kasus 1965 – 1967 di ranah publik, kami juga berharap bahwa pemerintah Indonesia ada niat baik dan mulai membuka ruang mengenai kasus kejahatan masa lalu, berdasarkan mekanisme hukum nasional maupun mekanisme hukum Internasional. Kami juga akan terus mendesak kedua Negara, yakni Timor-Leste dan Republik Indonesia serta PBB untuk mendiskusikan laporan Chega! dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) supaya bisa mengimplementasi rekomendasi yang ada dalam laporan tersebut, terutama soal dibentuknya Komisi Untuk Mencari Orang Hilang. Karena hampir sepuluh tahun, antara kedua pemerintah belum serius dalam memenuhi kewajibannya sesuai rekomendasi dari KKP. Jangan lupa bahwa komunitas internasional telah berjanji berkali-kali bahwa harus didirikan pengadilan internasional jika kedua Negara gagal dalam memutuskan rantai impunitas pada kasus kejahatan berat. Kami begitu yakin bahwa, Presiden Joko Widodo sangat menghargai hukum, demokrasi serta hak asasi manusia dengan demikian kami meminta supaya kerjasama ini didorong kedepan untuk bersama menghadapi beragam tantangan besar yang mana menghalangi kedua belah pihak rakyat yakni rakyat Timor-Leste dan rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kami sebagai aktivis hak asasi manusia dan rakyat Timor-Leste bersama kawan aktivis dan rakyat Indonesia akan terus membantu serta mencari demokrasi untuk Indonesia dan keadilan untuk rakyat Timor-Leste.

Terimakasih.

Dili, 25 Januari 2016
Sekretariat ANTI